


KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA



KOMPILASI KLIPING MEDIA CETAK KEMENTERIAN PERTANIAN RI

18 JUNI 2024

-Biro Humas dan Informasi Publik-

Title	Bulog Telah Menyerap Beras Lokal Mencapai 700 Ribu Ton	 Kementerian Pertanian
Date	18 Juni 2024	
Media	Koran Jakarta	
Page	12	
Author	SB/N-3	

Kebijakan Pemerintah

Bulog Telah Menyerap Beras Lokal Mencapai 700 Ribu Ton

JAKARTA - Perum Bulog telah melakukan penyerapan beras lokal mencapai 700 ribu ton setara beras. Jumlah tersebut melebihi dari yang ditargetkan pemerintah sebanyak 600 ribu ton pada semester 1 di tahun 2024.

"Saat ini kami telah menyerap kurang lebih 700 ribu ton, lebih dari target yang telah ditugaskan oleh pemerintah sebesar 600 ribu ton," kata Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (15/6).

Seperti dikutip dari *Antara*, Bayu menyampaikan pilihannya optimistis bisa menyerap lebih dari 900 ribu ton setara beras pada tahun ini. "Impor hanya dilakukan bila perlu, melihat neraca beras yang ada," ujar Bayu.

Dia menyebutkan saat ini cadangan beras pemerintah (CBP) yang dimiliki oleh Perum Bulog sebanyak 1,8 juta ton. Dari jumlah tersebut 30 persen berasal dari stok dalam negeri.

"Hal ini tentunya merupakan

suatu pencapaian tersendiri, mengingat masa pengadaan dalam negeri yang singkat disebabkan masa panen padi yang pendek sekitar dua sampai tiga bulan," jelas Bayu.

Untuk bisa menyerap gabah dalam negeri secara maksimal, lanjut Bayu, pengadaan Perum Bulog memiliki beberapa mekanisme di antaranya pertama adalah membeli gabah dan menunggu di gudang.

"Hal ini hanya bisa dilakukan di 10 sentra penggilingan padi yang dimiliki Perum Bulog di mana kami bisa menyerap gabah dalam jumlah yang cukup banyak," jelasnya.

Jemput ke Petani

Kedua, membeli gabah dengan cara menjemput ke petani. Kemudian, mekanisme ketiga adalah membeli beras asalan dari penggilingan-penggilingan padi kecil yang dibeli dan diolah sehingga menghasilkan beras sesuai kemauan pasar.

Lebih lanjut, Bayu mengatakan meskipun penyerapan gabah dalam



ANTARA/CEDE/KE2 ANGCARA

Dua orang pekerja mengangkut beras lokal serapan dari petani di gudang Bulog Indramayu, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

negeri sudah optimal, namun persoalan serius terdapat pada proses produksi.

"Jumlah penduduk bertambah

menurut deret ukur, sedangkan produksi pangan bertambah menurut deret hitung. Teori yang dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus,

saat ini seakan makin nyata dengan berbagai negara di dunia mulai dihantui oleh krisis pangan," tuturnya.

Selain jumlah populasi penduduk yang terus meningkat, lanjut Bayu, krisis iklim, pembatasan ekspor dan kondisi geopolitik, membuat banyak negara harus berkuat dengan persoalan ketahanan pangan.

"Menjawab tantangan, Perum Bulog kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas pangan nasional," jelasnya.

Perum Bulog yang saat ini memiliki fungsi sebagai operator pelaksana kebijakan distribusi pangan yang diregulasi oleh pemerintah, kata Bayu, tentunya mengalami tantangan tersendiri dalam menuntaskan persoalan ketahanan pangan.

Karena persoalan ketahanan pangan harus dibahas secara utuh dari hulu ke hilir, termasuk dari proses produksi, distribusi sampai konsumsi.

"Perum Bulog hanya bisa menyerap gabah, bila produksinya

ada. Kami berkomitmen untuk terus memprioritaskan penyerapan gabah dalam negeri," katanya.


La menambahkan, Perum Bulog mulai masuk ke ranah hulu dengan memiliki program bernama mitra tani. Program tersebut untuk membantu peningkatan produktivitas pertanian petani.

"Key Performance Indicator (KPI) kami adalah meningkatkan produktivitas petani melalui program ini, bukan semata-mata hanya untuk bisa mendapatkan beras. Kalau petani bisa meningkatkan produktivitasnya maka secara makro ada peningkatan produksi beras. Saat ini sudah ada 250 hektare lahan yang dikelola dalam program ini," Bayu menerangkan.

Selain itu, Perum Bulog terus berupaya menjaga stabilitas pangan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan salah satu visi transformasi yang sedang dilakukan oleh Perum BUMN di bidang pangan tersebut. ■ SB/N-3

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN

Title	Diversifikasi Produk Lokal Perkuat Ketahanan Pangan	 Kementerian Pertanian
Date	18 Juni 2024	
Media	Koran Jakarta	
Page	6	
Author	Ers/E-10	

Hilirisasi Pertanian | Inovasi Produk Pangan Terus Didorong untuk Penuhi Kebutuhan Pasar

Diversifikasi Produk Lokal Perkuat Ketahanan Pangan

Komoditas agribisnis dan bahan pangan lokal alternatif menjadi tulang punggung ketahanan pangan Indonesia.

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memacu peningkatan produksi pangan dalam negeri guna menjaga dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Pengembangan industri pangan dilakukan melalui hilirisasi produk pertanian sehingga tercipta diversifikasi produk pangan melalui pemanfaatan sumber daya atau bahan baku lokal dengan meningkatkan nilai tambahnya.

"Pengembangan industri pangan masih memiliki prospek yang besar, sehingga di-

harapkan ke depannya hilirisasi produk pertanian dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri," kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Reni Yanita, Jumat (14/6).

Menurut Dirjen IKMA, komoditas agribisnis dan bahan pangan lokal alternatif merupakan tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Sebab, masyarakat tak hanya membutuhkan bahan pangan segar, tetapi juga olahan pangan lanjutan.

Dia mencontohkan pelaku industri dapat memanfaatkan bahan baku pengganti beras sebagai sumber karbohidrat, seperti singkong, sagu, porang, dan sorgum.

"Percepatan hilirisasi komoditas bahan pangan saat ini sangat diperlukan karena besarnya potensi untuk pengembangan produk olahan

lanjutan yang dihasilkan dari bahan baku lokal, baik produk antara (*intermediate product*) maupun produk jadi (*end product*) yang siap dikonsumsi," papar Reni.

Direktur IKM Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan, Yedi Sabaryadi, mengungkapkan produk pangan inovatif juga memiliki segmen pasar di sektor ritel. Pada Mei 2024, Ditjen IKMA melaksanakan kegiatan *Business Matching* yang mempertemukan 47 IKM pangan terpilih dengan 24 perusahaan ritel yang menghasilkan potensi transaksi mencapai 33 miliar rupiah.

"Sebanyak 26 IKM peserta *Business Matching* merupakan alumni program *Indonesia Food Innovation* (IFI), dan ada satu IKM dengan produk madu mencatatkan potensi transaksi tertinggi senilai 1,02 miliar rupiah," ungkap Yedi.

Butuh Kolaborasi

Menurutnya, percepatan hilirisasi produk agrikultur membutuhkan campur tangan atau kolaborasi berbagai pihak, seperti *startup*, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, serta IKM teknologi tepat guna, yang dapat menjadi mitra. Sedangkan di rantai produksi industri pangan, para pelaku harus memperhatikan bahan baku pembuatan produk, produksi, hingga tahap distribusi ke tangan konsumen.

Dalam upaya mengakselerasi bisnis IKM pangan yang memiliki inovasi dalam produk dan/atau prosesnya, serta yang memiliki bahan baku utama sumber daya lokal, Ditjen IKMA rutin menyelenggarakan program *Indonesia Food Innovation* (IFI).

Tujuannya, agar IKM pangan siap menjadi industri pa-


ngan yang mudah dipasarkan, menguntungkan, dan berkelanjutan (*marketable, profitable, dan sustainable*). Pendaftaran IFI tahun ini telah dibuka sejak 6 Juni 2024 melalui laman www.ifi.kemenperin.go.id.

"Masing-masing komoditas agribisnis tentu memiliki karakteristik yang sangat spesifik, sehingga pengolahannya diperlukan proses yang berbeda bahkan diperlukan inovasi untuk menghasilkan produk yang optimal dan memenuhi kebutuhan pasar. Untuk mendukung hal tersebut, Kemenperin melalui Ditjen IKMA menyelenggarakan program IFI," ucap Yedi.

Lebih lanjut, pendaftar IFI meningkat setiap tahunnya. Selama empat kali dilaksanakan, jumlah pendaftar mencapai 7.925, dan pada 2023 sebanyak 2.153 pendaftar yang ikut seleksi program IFI. ■ **ers/E-10**

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**

Title	Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan Bukan Solusi Permanen	 Kementerian Pertanian
Date	18 Juni 2024	
Media	Koran Jakarta	
Page	1	
Author	Ers/E-9	

Kemiskinan Ekstrem

Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan Bukan Solusi Permanen

JAKARTA - Upaya Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di seluruh Indonesia dengan menggencarkan intervensi pengendalian kerawanan pangan ke keluarga rentan dinilai hanya bersifat sesaat, bukan solusi permanen. Sebab, intervensi hanya terasa saat menerima bantuan dan setelah program tersebut selesai, maka mereka akan kembali jatuh dalam jurang kemiskinan ekstrem.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, YB. Suhartoko, di Jakarta, Senin (17/6), mengatakan pemberian bantuan pangan kepada keluarga rawan pangan dalam jangka sangat pendek memang akan mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, namun bisa jadi sangat sementara, apabila tidak dicari akar masalahnya.

Menurut Suhartoko, penyebab kemiskinan ekstrem bukan sekadar pendapatan saja, tetapi akses pasar, biaya yang tinggi untuk mencapai tempat kerja, jumlah tanggungan keluarga, lingkungan yang tidak sehat, keterampilan yang dimiliki, dan berbagai variabel lain.

"Oleh karena itu, pendekatan terhadap kelompok rawan pangan jangan sekadar karitatif saja yang juga menimbulkan risiko ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. Keluarga rawan pangan perlu ditingkatkan menjadi keluarga yang mandiri," tegas Suhartoko.

Peran pemerintah lebih pada fungsi fasilitator dengan memberi pendampingan dan konsultasi. "Kelembagaan masyarakat yang bersifat gotong royong perlu didorong untuk menjadi katalisator perubahan masyarakat," katanya.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (15/6), menyebutkan bahwa intervensi pengendalian kerawanan pangan dilakukan melalui penyaluran bantuan pangan kepada keluarga rawan pangan, yaitu kelompok pengeluaran 10 persen terbawah/desil 1 sebagai sasaran dari upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Arief menyampaikan bahwa Bapanas mendukung upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 melalui kegiatan intervensi pengendalian kerawanan pangan yang diharapkan dapat mendorong pengentasan kemiskinan ekstrem menuju 0 persen. "Ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem," kata Arief.


Bapanas, kata Arief, juga telah meluncurkan penyaluran secara simbolis bantuan pangan kegiatan intervensi pengendalian kerawanan pangan tahun 2024 pada Rabu (12/6) di Cilacap, Jawa Tengah.

Pemberian bantuan pangan, menurutnya, bertujuan mengurangi beban pengeluaran kepala keluarga (KK) dan mengentaskan daerah rentan rawan pangan serta menguatkan daerah tahan pangan. Ia yakin upaya pengentasan kemiskinan akan berpengaruh nyata dalam mengurangi masyarakat rawan pangan. "Ini tidak ada kaitannya dengan politik karena tugas negara menjaga kesejahteraan masyarakat," kata Arief.

Langkah itu, pungkasnya, sejalan dengan amanat yang diemban Badan Pangan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021, di mana salah satu tugasnya adalah menyelenggarakan fungsi pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran bantuan pangan. ■ **ers/E-9**

« Oleh karena itu, pendekatan terhadap kelompok rawan pangan jangan sekadar karitatif saja yang juga menimbulkan risiko ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. »

YB. SUHARTOKO
Dosen Fakultas
Ekonomi dan Bisnis
Universitas Katolik
Atmajaya Jakarta

Title	KTT Perdamaian Ukraina Sahkan Deklarasi Akhir	 Kementerian Pertanian
Date	18 Juni 2024	
Media	Koran Jakarta	
Page	12	
Author	YK/N-3	

Stabilitas Kawasan

KTT Perdamaian Ukraina Sahkan Deklarasi Akhir

BURGENSTOCK - KTT perdamaian di Ukraina, yang berlangsung dua hari di Burgenstock, Swiss, berakhir pada Minggu (16/6), dengan pengesahan deklarasi akhir. Lebih dari 90 negara menghadiri perundingan tersebut, namun komunike bersama tersebut didukung oleh hanya 80 negara dan empat organisasi.

Sebanyak 16 negara dan organisasi, termasuk Indonesia, Libya, Arab Saudi, Thailand, India, Meksiko, Afrika Selatan, Brasil, dan Uni Emirat Arab, abstain.

Seperti dikutip dari *Antara*, dalam pidato penutupnya pada sidang pleno, Presiden Swiss, Viola Amherd, mengatakan bahwa meski berbeda pandangan mereka berhasil menyepakati visi bersama. "Kami telah menetapkan visi tersebut dalam Komunike Burgenstock," kata Amherd.

"Dengan ini, kita mengirim sinyal yang jelas kepada rakyat Ukraina dan semua pihak yang terkena dampak langsung akibat perang. Sebagian

besar komunitas internasional mempunyai keinginan untuk membawa perubahan," katanya.

Dia mengatakan dengan deklarasi akhir, negara-negara telah menetapkan kerangka kerja dan diskusi lebih lanjut harus dilakukan.

Amherd menyebutkan tiga topik yang akan diupayakan oleh negara-negara. "Pertama, setiap penggunaan energi nuklir dan instalasi nuklir harus aman, terlindungi, dan ramah lingkungan," katanya.

Ketahanan Pangan

Kedua, tambah Amherd, ketahanan pangan tidak boleh dipersenjataikan dengan cara apa pun. Serangan terhadap kapal dagang di pelabuhan dan di sepanjang rute, serta terhadap pelabuhan sipil dan infrastruktur pelabuhan sipil, tidak dapat diterima.


Ketiga, semua tawanan perang harus dibebaskan melalui pertukaran penuh. Semua anak-anak Ukraina yang dideportasi dan dipindahkan secara tidak sah, serta semua warga sipil Ukraina

lainnya yang ditahan secara tidak sah, harus dikembalikan ke Ukraina.

Dalam deklarasi bersama tersebut, negara-negara pendukung mengatakan mereka melakukan pertukaran pandangan yang bermanfaat, komprehensif, dan konstruktif menuju kerangka perdamaian yang komprehensif, adil dan abadi, berdasarkan hukum internasional, termasuk Piagam PBB.

"Secara khusus, kami menegaskan kembali komitmen untuk menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara mana pun, prinsip kedaulatan, kemerdekaan dan integritas wilayah semua negara," bunyi pernyataan tersebut.

"... termasuk Ukraina, dalam perbatasan mereka yang diakui secara internasional, termasuk perairan teritorial, serta penyelesaian sengketa melalui cara damai sebagai prinsip hukum internasional," lanjut pernyataan tersebut. ■ YK/N-3

Title	Pemerintah Perkuat Neraca Pangan Daerah	
Date	18 Juni 2024	
Media	Koran Jakarta	
Page	5	
Author	Ers/E-10	

Pengendalian Inflasi

Pemerintah Perkuat Neraca Pangan Daerah

JAKARTA - Penguatan neraca pangan daerah menjadi aspek penting dalam memberikan gambaran secara utuh terhadap situasi surplus dan defisit di setiap daerah. Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi sesuai menghadiri Rakornas Pengendalian Inflasi yang dibuka Presiden Joko Widodo pada Jumat (14/6) di Istana Negara, Jakarta.

“Badan Pangan Nasional mendorong setiap daerah punya neraca, sehingga tahu kebutuhan pangannya berapa, berapa yang harus diproduksi. Basis data pangan yang kuat akan memberikan situasi yang lebih tepat dan menentukan pemetaan intervensi stabilisasi di lapangan secara lebih akurat,” ujar Arief.

Setiap daerah memiliki keunggulan komoditas pangannya, sehingga dengan neraca pangan daerah tersebut, daerah bisa menjalin kerja sama antardaerah yang kuat dengan saling mengisi komoditas pangan yang defisit di daerah masing-masing.

“Dengan adanya neraca pangan daerah, kita dapat memantau dan mengelola distribusi pangan secara lebih efektif dan efisien. Hal ini sangat krusial untuk memastikan stabilitas harga pangan dan mencegah terjadinya kelangkaan yang dapat memicu inflasi,” ungkap Arief.

Arief juga mengajak seluruh

pemerintah daerah untuk meningkatkan sinergi dalam penyusunan neraca pangan ini.


“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan dalam pengelolaan pangan nasional. Kami berharap dengan langkah pengendalian inflasi yang terus kita koordinasikan bersama melalui pertemuan rutin yang dikordinasikan Bapak Mendagri, kita berharap inflasi tetap terjaga sesuai target pemerintah,” tegasnya.

Penyediaan Data

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya pada Rakornas Pengendalian Inflasi tersebut juga menekankan peran Bapanas dalam memastikan kelancaran distribusi pangan, utamanya 10 komoditas pangan strategis.

“Kesinambungan pasokan domestik kunci utama menjaga stabilitas pangan di seluruh daerah. Pengembangan neraca pangan menjadi penting. Dari Badan Pangan Nasional mempersiapkan, yaitu penyediaan data yang akuntabel. Dengan data ini stabilisasi harga di daerah dapat termonitor dengan baik,” ujar Airlangga.

Adapun Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyampaikan tren inflasi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir turun dan terkendali rendah, bahkan termasuk terendah di dunia saat ini. ■ **ers/E-10**

Title	Hentikan Impor Hewan Hidup	 Kementerian Pertanian
Date	18 Juni 2024	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	2	
Author	Elfha Shavira	

Hentikan Impor Hewan Hidup


Act For Farmed Animals (AFFA), Animal Friends Jogja (AFJ) dan Animals Don't Speak Human (ADSH) berkolaborasi dalam aksi bersama di Hari Penyadartahuan Internasional Pelarangan Ekspor Hewan Hidup (Ban Live Exports International Awareness Day).

Aksi berlangsung di Jakarta, DIY Yogyakarta, Lombok, Malang, dan Medan dengan menunjukkan kepada publik penderitaan hewan yang dikirim hidup-hidup. Tiga organisasi perlindungan hewan yang ditenak ini juga mendesak pemerintah Indonesia untuk menghentikan impor hewan hidup guna mengakhiri penderitaan hewan dan melestarikan lingkungan.

Selain menyebabkan penderitaan yang besar pada hewan, praktik impor hewan hidup juga merusak lingkungan. Mengutip Greenpeace Australia, mayoritas pengrusakan hutan di Australia dilakukan untuk menciptakan padang rumput bagi hewan yang ditenakkan, yang dijual di Australia dan diekspor ke luar negeri. Sekitar 88% habitat hewan liar pun hilang karena peternakan sapi.

Rata-rata ratusan ribu individu hewan hidup diimpor ke Indonesia setiap tahun. Di tahun 2023 saja, 339.414 ekor sapi menderita karena impor sapi hidup dari Australia. Hewan-hewan yang diimpor mengalami kepanasan, kedinginan, kelaparan, dan dehidrasi selama perjalanan.

Elfha Shavira
Manajer Kampanye Act For Farmed Animals

Title	NTB Fokus ke Cabai & Unggas	 Kementerian Pertanian
Date	18 Juni 2024	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	6	
Author	Harian Noris S	

| PENGENDALIAN INFLASI DAERAH |

NTB Fokus ke Cabai & Unggas

Bisnis, DENPASAR — Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat memacu produksi cabai dan unggas untuk menjaga laju inflasi agar tetap berada di kisaran 2,5%—3%.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Winda Putri Listya menjelaskan penanaman cabai dan unggas dikemas dalam program Tancapkan Gas atau Tanam Cabe Pelihara Ikan dan Unggas yang terdiri atas kegiatan kampung aneka cabai, kampung unggas, pembenihan ikan, dan NTB MALL.

“Program ini merupakan implementasi dari strategi 4K khususnya dari aspek ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga yang outputnya adalah terkendalinya angka inflasi NTB sebesar 3,02% sesuai dengan target angka inflasi nasional tahun 2023

yaitu $3,0 \pm 1\%$,” katanya dalam keterangan resmi, akhir pekan lalu.


Dia menilai hal itu diapresiasi oleh pemerintah pusat melalui penghargaan yang diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) NTB karena masuk dalam kategori daerah dengan pengendalian inflasi terbaik.

Menurutnya, upaya peningkatan produksi cabai dan unggas karena selama ini dua komoditas tersebut memberi andil yang besar terhadap inflasi NTB. selama ini, harga cabai yang bisa melambung tinggi di musim tertentu bisa mendorong naiknya inflasi, begitu juga dengan telur yang harganya fluktuatif karena dipengaruhi oleh produktivitas ayam petelur.

Selain itu, TPID Sidak Pasar Pemantauan Harga Bahan

Pokok, Gerakan Operasi Pasar Murah dengan melakukan mobilisasi pangan dari daerah surplus ke daerah minus, sinergi bersama asosiasi dan pengusaha untuk pengendalian inflasi, melakukan komunikasi efektif untuk menjaga ekspektasi masyarakat, serta pembuatan Peraturan Gubernur (Pergub) dalam rangka pengendalian ketersediaan pasokan komoditas di NTB.

Untuk mendukung target lumbung pangan, pemerintah membangun sejumlah bendungan di NTB yang akan mengairi sawah dan menyuplai kebutuhan air rumah tangga. Ada enam bendungan yang dibangun di Lombok dan Sumbawa, yang sudah selesai dan beroperasi yakni bendungan Tiu Suntuk yang menelan anggaran sekitar Rp1,4 triliun, dikerjakan pada 2020—2023. *(Harian Noris S)*

Title	Rantai Pasok Kurban	 Kementerian Pertanian
Date	18 Juni 2024	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	2	
Author	Irvan Maulana	

Rantai Pasok Kurban

Setiap momen Iduladha, persoalan rantai pasok (*supply chain*) hewan kurban selalu muncul setiap tahunnya. Meskipun daging kurban berpotensi meningkatkan asupan gizi dan kesehatan masyarakat kurang mampu, pendistribusiannya justru menghadapi kendala ketidakmerataan.

Kesenjangan distribusi sangat terlihat antara wilayah perkotaan besar di Pulau Jawa dengan daerah-daerah lainnya di Nusantara. Ketimpangan ini menyebabkan kelompok masyarakat termiskin di banyak wilayah kesulitan mengakses sumber protein hewani.

Padahal, daerah-daerah prioritas intervensi gizi melalui kurban sudah ditetapkan dan didominasi oleh daerah luar Jawa dengan karakteristik umum adalah daerah tertinggal dan terisolasi.

Studi terbaru Institute for Demographic and Poverty Studies (*Ideas*) menunjukkan bahwa daerah dengan potensi surplus kurban terbesar masih didominasi daerah metropolitan Jawa, seperti Jakarta (9.905 ton) serta Bandung Raya yaitu Bandung, Cimahi dan Sumedang (6.355 ton).

Daerah surplus kurban terbesar lainnya adalah Sleman dan Bantul (4.975 ton), Bogor, Depok, dan Sukabumi (2.381 ton), Surabaya dan Sidoarjo (1.952 ton), Tangerang Selatan dan Kota Tangerang (1.699 ton) dan Bekasi (1.012 ton).

Sementara itu wilayah dengan potensi defisit kurban terbesar didominasi daerah pedesaan Jawa. Wilayah tersebut yaitu *pertama* Kabupaten Grobogan, Blora, Pati, Jepara, dan Demak (-2,623 ton), *kedua* kawasan utara Jawa Timur, yaitu Bangkalan, Sampang,

Pamekasan, dan Sumenep (-2.484 ton), *ketiga* kawasan timur Jawa Timur yaitu Jember, Bondowoso, Probolinggo, dan Pasuruan (-1.964 ton).

Keempat kawasan utara Jawa Tengah yaitu Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang, Purbalingga, dan Pekalongan (-1.958 ton), *kelima* Jombang, Nganjuk, Madiun, Ngawi, Bojonegoro, Mojokerto, dan Kota Kediri (-1.849 ton), *keenam* Kabupaten Tangerang, Pandeglang, dan Lebak (-1.764 ton).

Inilah ironis yang terjadi, di saat penduduk Jakarta dan kota-kota besar lainnya yang lumrah mengonsumsi daging dan mendapatkan banyak daging kurban, di tempat lain masyarakat miskin justru jarang atau tidak pernah memikirkan bagaimana rasanya memakan daging.

Data dan fakta tersebut terjadi disebabkan lemahnya manajemen rantai pasokan (*supply chain*) ekonomi kurban pada tingkat hilir di Indonesia.

Secara sosial ekonomi kurban memiliki fungsi pemerataan dan keadilan. Tidak hanya secara langsung berupa pembagian daging kurban kepada masyarakat, tetapi juga melalui efek *multiplier* yang muncul. Dalam dimensi ekonomi, kurban menciptakan nilai ekonomi untuk entitas yang berpartisipasi langsung dalam rantai pasokan kurban, ataupun entitas yang terpengaruh *side effect* dari pelaksanaan kurban itu sendiri.

Namun, dalam praktiknya entitas-entitas yang terlibat dalam rantai pasok kurban saling terhubung dan bergantung satu sama lain. Hubungan antarentitas tersebut pada dasarnya bersifat B2B (*business to business*).

Beberapa pihak telah berusaha mengatasi isu ini.



IRVAN MAULANA
Direktur Center of Economic and Social Innovation Studies (Cesis)

Baznas melalui program Kurban Berdayakan Desa, misalnya, berupaya meningkatkan kesejahteraan para peternak lokal dengan mempersingkat *supply chain* kurban. Program ini mendorong perputaran ekonomi ke desa dengan membeli hewan kurban langsung dari peternak. Dengan cara ini, keuntungan peternak meningkat dan harga wajar untuk konsumen dapat ditekan.

Namun, tingginya keuntungan penjualan hewan kurban cenderung masuk ke kantong para pemilik modal (penjual musiman). Hal ini mereduksi argumentasi kurban dapat meningkatkan pemerataan pendapatan ekonomi umat.

Untuk itu, dalam mengawal pelaksanaan kurban, entitas baru perlu dibentuk dengan beberapa fungsi, yaitu *intermediary*, pemberdayaan, dan pengawasan. Entitas ini berasal dari dua kalangan. *Pertama*, entitas yang berada di bawah pemerintahan yang menjalankan ketiga fungsi tersebut sekaligus. *Kedua*, entitas yang berasal dari swasta dan bertanggung jawab pada lembaga pemerintah.

Diharapkan dengan adanya fungsi ini maka akan tersedia

data yang masif dalam sistem kurban Indonesia yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan mengatur strategi pendistribusian hewan kurban dan pemberdayaan peternak.


Model seperti ini akan menciptakan dua aliran *supply chain* kurban, yaitu aliran program dan pemberdayaan dengan aliran informasi. Dampaknya, *supply chain* kurban akan menjadi lebih efektif dari beberapa sisi.

Pertama, harga hewan kurban akan menjadi lebih murah. Andai pun harganya tidak berubah, tetapi kue ekonominya akan lebih banyak dinikmati oleh peternak bukan oleh pedagang seperti saat ini. *Kedua*, akan menciptakan sistem peternakan yang lebih baik sehingga rantai pasokan hewan kurban akan lebih berkesinambungan.

Ketiga, akan meningkatkan kesejahteraan hewan dengan adanya pelatihan dan pengawasan yang dilakukan. Dan yang *terakhir*, pemerataan dampak sosial ekonomi kurban akan lebih baik karena adanya perencanaan yang lebih matang serta strategi yang dilandasi oleh pendataan yang masif.

Jika hal ini bisa dijalankan maka akan menciptakan *supply chain* kurban yang ideal yang mampu memberikan dampak positif baik secara ekonomi maupun sosial tetapi tidak meninggalkan esensinya sebagai ibadah yang sakral.

Setiap artikel yang dikirim ke redaksi hendaknya diketik dengan spasi ganda maksimal 5.000 karakter, disertai riwayat hidup (*curriculum vitae*) singkat tentang diri penulis juga **dilengkapi foto terbaru**. Artikel yang masuk merupakan hak redaksi Bisnis Indonesia dan dapat diterbitkan di media lain yang tergabung dalam Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI). Apabila lebih dari 1 minggu artikel yang diterima belum diterbitkan tanpa pemberitahuan lain dari redaksi, penulis berhak mengirimkannya ke media lain. Setiap tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulis. Artikel dapat dikirim melalui alamat e-mail redaksi@bisnis.com.

Title	Semarang Andalkan Digitalisasi Pertanian	 Kementerian Pertanian
Date	18 Juni 2024	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	18	
Author	M. Faisal Nur Ikhsan	

| ANTISIPASI INFLASI |

Semarang Andalkan Digitalisasi Pertanian

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah Kota Semarang bakal memanfaatkan bantuan teknologi informasi di sektor pertanian untuk menekan laju inflasi yang disebabkan oleh bahan pangan jelang periode kemarau.

Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan pihaknya mengandalkan teknologi pertanian hingga inovasi pertanian berbasis digital untuk menekan laju inflasi di wilayahnya saat musim kemarau yang berdampak langsung terhadap petani.

“Arahan dari Presiden Joko Widodo untuk mengantisipasi kekeringan pada 2050. Kekeringan tersebut bisa memberikan dampak terhadap 500 juta petani-petani kecil di Indonesia,

sehingga diharapkan kita melakukan inovasi-inovasi, di antaranya adalah *smart farming*,” katanya, akhir pekan lalu.

Ita, sapaan akrab Hevearita, mengatakan bahwa pihaknya bakal menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN untuk mengatasi keterbatasan lahan pertanian di Semarang.

Kerja sama tersebut nantinya akan memiliki *output* berupa pemanfaatan teknologi agar pengembangan sektor pertanian di Semarang bisa optimal.


Lebih lanjut, Ita membeberkan bahwa Presiden Joko Widodo telah memberikan imbauan kepada pemerintah daerah untuk mempersiapkan cadangan

air jelang kemarau. Presiden juga mengajak pemerintah daerah untuk mulai menyiapkan pompa air di daerah atau wilayah dengan produktivitas pertanian tinggi.

Menurutnya, Pemerintah Kota Semarang bakal mengoptimalkan pemanfaatan sungai sebagai air baku yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pertanian, tapi juga konsumsi masyarakat.

“Baik dari sungai besar, sungai kecil, maupun sungai sedang untuk dialirkan ke daerah-daerah pertanian. Harapannya bisa membantu sektor pertanian agar tetap daulat pangan, sehingga inflasi akan tetap terjaga,” jelasnya.

(M. Faisal Nur Ikhsan)


Title	Ekspor Kelapa Parut Kering Ke Bulgaria Capai 24,6 Miliar	
Date	18 Juni 2024	
Media	Rakyat Merdeka	
Page	10	
Author	Rakyat Merdeka	

Ekspor Kelapa Parut Kering Ke Bulgaria Capai 24,6 Miliar

EKSPOR kelapa parut kering asal Indonesia ke Bulgaria menjadi suatu kebanggaan. Peralnya, pelaku usaha Indonesia mampu melakukan terobosan dan sukses menembus pasar nontradisional.

Nilai ekspor tersebut sebesar 1,5 juta dolar AS atau sekitar Rp 24,6 miliar dengan estimasi volume 1.000 ton.

Ekspor kelapa parut kering ini menjadi upaya bersama mempopulerkan *Indonesia spice up the world*, atau misi mempopulerkan bumbu masak dan kuliner Indonesia. ■

Title	Food Station Tak Boleh Jual Beras Mahal-mahal	 Kementerian Pertanian
Date	18 Juni 2024	
Media	Rakyat Merdeka	
Page	11	
Author	DRS	

Harga Yang Premium Tinggi, Stok Medium Langka Food Station Tak Boleh Jual Beras Mahal-mahal

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Food Station Tjipinang Jaya tidak menjual beras premium dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Dengan begitu, masyarakat bisa mengonsumsi nasi dengan kualitas baik dan harga terjangkau.

ANGGOTA Komisi B DPRD DKI Jakarta Wawan Suhawan mengatakan, sejak September masyarakat terus dibebani oleh harga beras yang merangkak naik. Karena itulah, Food Station Tjipinang Jaya harus mengambil peran untuk meringankan beban warga.

"Tjipinang Jaya merupakan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, sehingga bisa menjual beras dengan harga murah. Harus ada tujuan sosialnya," kata Wawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (13/6/2024).

Wawan juga akan mengusulkan kepada pimpinan Komisi B untuk menggelar rapat kerja bersama BUMD bidang pangan. "Komisi B akan memanggil Food Station Tjipinang Jaya agar tidak menetapkan harga terlalu tinggi dan menyediakan stok yang cukup," ujarnya.

Selain itu, Wawan meminta Food Station Tjipinang Jaya memperluas kerja sama dengan daerah penghasil beras seperti Indramayu, Karawang dan Bekasi, demi menjaga stok.

"Kalau stoknya ada, harga beras bisa dikendalikan. Ini tugas Pemerintah menyiapkan stok yang banyak," ucap dia.

Hal senada disampaikan Ang-

gota Komisi B Munir Arsyad. Menurutnya, beras medium dibutuhkan kalangan masyarakat menengah ke bawah. Karena itu, Food Station Tjipinang Jaya harus memperbanyak produksi beras tersebut.

Politisi Partai Gerindra ini mengaku menerima banyak keluhan dari warga daerah pemilihan (dapil)-nya yang kesulitan menemukan beras medium. Sebab, di minimarket lebih banyak menjual beras premium.

Bahkan di *Marketplace official store* Food Station Tjipinang Jaya juga tidak ditemukan beras medium.

Munir mewanti-wanti, meski harus memperbanyak produksi beras medium, Food Station Tjipinang Jaya diimbau tetap memperhatikan kualitas.

Selain itu, distribusi juga harus menjadi perhatian PT Food Station Tjipinang Jaya. Dia menyarankan BUMD itu menggandeng warung tradisional untuk pendistribusian beras medium.

Sebagai informasi, Pemerintah resmi menaikkan HET untuk beras medium dan premium. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan



Wawan Suhawan

atas Perbadan Nomor 7 tahun 2023 tentang HET Beras.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, penetapan regulasi HET beras ini menguatkan kebijakan relaksasi yang telah diberlakukan melalui Keputusan Kepala Bapanas sebelumnya.

Kenaikan HET beras juga diputuskan bersamaan dengan naiknya Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah dan Beras.

Menurut Arief, proses penetapan HET beras ini telah mengalami berbagai dinamika, diskusi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan perberasan.

"Ini kita analisis bersama dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Termasuk bagaimana dampaknya terhadap inflasi," kata Arief dalam keterangannya, Minggu (9/6/2024).

Dalam Perbadan tersebut, Pemerintah mengatur HET beras berdasarkan wilayah.

Beras medium: Jawa, Lampung dan Sumatera Selatan relaksasi HET sebesar Rp 12.500 per kilogram (kg) dari HET sebelumnya sebesar Rp 10.900 per kg.

Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Kepulauan Riau, Riau, Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung relaksasi HET sebesar Rp 13.100 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 11.500 per kg.

Bali dan Nusa Tenggara Barat relaksasi HET sebesar Rp 12.500 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 10.900 per kg.

Nusa Tenggara Timur relaksasi HET sebesar Rp 13.100 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 11.500 per kg.

Sulawesi relaksasi HET sebesar Rp 12.500 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 10.900 per kg.

Kalimantan relaksasi HET sebesar Rp 13.100 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 11.500 per kg.

Maluku relaksasi HET sebesar Rp 13.500 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 11.800 per kg.

Papua relaksasi HET sebesar Rp 13.500 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 11.800 per kg.

Beras Premium: Jawa, Lampung dan Sumatera Selatan relaksasi HET sebesar Rp 14.900 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 13.900 per kg.

Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, dan Kepu-

luan Bangka Belitung relaksasi HET sebesar Rp 15.400 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 14.400 per kg.

Bali dan Nusa Tenggara Barat relaksasi HET sebesar Rp 14.900 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 13.900 per kg.

Nusa Tenggara Timur relaksasi HET sebesar Rp 15.400 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 14.400 per kg.

Sulawesi relaksasi HET sebesar Rp 14.900 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 13.900 per kg.

Kalimantan relaksasi HET sebesar Rp 15.400 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 14.400 per kg.

Maluku relaksasi HET sebesar Rp 15.800 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 14.800 per kg.

Papua relaksasi HET sebesar Rp 15.800 per kg dari HET sebelumnya sebesar Rp 14.800 per kg.


Namun dalam prakteknya, harga beras, baik medium maupun premium, berada di atas HET yang telah ditetapkan.

Dilihat dari *infopangan.jakarta*, pada Sabtu (15/6/2024), harga rata-rata beras medium di Jakarta Rp 14.336 per kg. Bahkan di Pasar Pos Pengumben, Jakarta Barat, beras medium dibanderol Rp 16.000 per kg. Sedangkan harga beras premium, rata-rata dibanderol Rp 14.927/

kg. Namun di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Rp 18.000 per kg. ■ DRS

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**

Title	Akuisisi Sumber Beras di Kamboja, Stok RI Aman	
Date	18 Juni 2024	
Media	Investor Daily	
Page	8	
Author	TI	


Akuisisi Sumber Beras di Kamboja, Stok RI Aman

JAKARTA, ID—Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) Arief Prasetyo Adi menyatakan, penjajakan Indonesia melalui Perum Bulog untuk mengakuisisi perusahaan beras di Kamboja bersifat transaksi bisnis tanpa memengaruhi stok pangan nasional. Akuisisi perusahaan beras di Kamboja itu juga bisa bermanfaat bagi Indonesia sebagai bahan penelitian dan riset. “Nomor satu itu pasti prioritas produksi dalam negeri, sudah pasti,” kata Arief usai Rakornas Pengendalian Inflasi 2024 di Istana Kepresidenan Jakarta pada 14 Juni 2024.

Transaksi bisnis antara satu perusahaan ke perusahaan lain lintas perbatasan negara lazim dilakukan oleh berbagai negara. “Itu dilakukan oleh China, Malaysia, punya *ranch* di Australia, di Tiongkok, itu *cross border* untuk beberapa negara yang tidak memungkinkan dilakukan di negaranya,” papar Arief seperti dikutip dari *Antara*, Senin (17/06/2024). Penjajakan akuisisi perusahaan beras di Kamboja juga bagian dari *business to business* dengan skala prioritas produksi dalam negeri. Pemenuhan stok beras dalam negeri dipastikan menjadi prioritas utama, berdasarkan berbagai kebijakan pemerintah dalam meningkatkan produksi

pangan nasional. “Sekarang nomor satu produksi dalam negeri, buktinya ada 20 ribu pompa, waduk, jalan usaha tani, pupuk dari 4,73 juta ton ke 9,55 juta ton, waduk dibangun 61 unit, saluran primer, sekunder, tersier pun dibangun, cetak sawah, benih. Itu artinya kita dorong produksi dalam negeri,” papar Arief.

Kerja sama itu juga tidak akan menggerus stok pangan nasional, sebab Bulog menjaga konsistensinya terhadap persediaan minimal 1 juta ton untuk kebutuhan masyarakat di Indonesia. “Barang itu ada, tapi tidak mesti untuk Indonesia. Indonesia kalau memerlukan akan lebih mudah, tapi kalau tidak memerlukan, biarkan internasional *trading*,” ujar Arief. Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Bulog akan mengakuisisi sumber beras di Kamboja. Akuisisi tersebut dilakukan atas perintah Presiden Joko Widodo. “Bulog akan akuisisi beberapa sumber beras di Kamboja. Presiden (Jokowi) sudah memerintahkan saya untuk kita tindak lanjuti. Dan memang sudah ditindaklanjuti, sekarang tinggal kita *due diligence*,” jelas Luhut di sela menghadiri HUT ke-52 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Jakarta pada 10 Juni 2024. **(tl)**

Title	Pemerintah Menaikkan HPP Gabah	
Date	18 Juni 2024	
Media	Investor Daily	
Page	8	
Author	Ant	



ANT

Pemerintah Menaikkan HPP Gabah

Petani menggunakan mesin saat memanen padi di persawahan Desa Kutuk, Undaan, Kudus, Jawa Tengah, baru-baru ini. Pemerintah menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan beras melalui Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 4 Tahun 2024, yakni harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani dari Rp5.000 menjadi Rp6.000 per kilogram, Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat penggilingan dari Rp5.100 menjadi Rp6.100 per kilogram dan Gabah Kering Giling (GKG) di penggilingan dari Rp6.200 menjadi Rp7.300 per kilogram.

Title	Produksi Beras Tahun Ini Masih Bisa Capai 32 Juta Ton
Date	18 Juni 2024
Media	Investor Daily
Page	8
Author	Tri Listiyarini



Produksi Beras Tahun Ini Masih Bisa Capai 32 Juta Ton

JAKARTA, ID—Produksi beras nasional tahun ini masih mungkin mencapai target sekitar 32 juta ton, asalkan iklim dan cuaca mendukung, seperti tidak terjadi fenomena El Nino atau La Nina dengan level kuat. Guna merealisasikan produksi beras sekitar 32 juta ton di 2024, pemerintah telah mengerahkan segala upaya (*all-out*), mulai dari menggeber program pemasangan pompa (pompanisasi) pada lahan-lahan sawah tadah hujan, menormalkan kuantum pupuk bersubsidi, hingga menaikkan harga pembelian gabah di tingkat petani.

Oleh Tri Listiyarini

Berdasarkan Prognosa Neraca Pangan Nasional (NPN) Januari-Desember 2024 yang diperbarui 20 Mei 2024, produksi beras domestik tahun ini ditargetkan 31,58 juta ton atau lebih rendah dari Prognosa NPN Januari-Desember 2024 yang diperbarui 23 April 2024 sebesar 32 juta ton. Sedangkan menurut Kerangka Sampel Area Badan Pusat Statistik (KSA BPS) amatan April 2024, realisasi produksi beras Januari-April telah mencapai 10,9 juta ton dan sepanjang Januari-Juli diproyeksikan 18,64 juta ton (Mei-Juli masih angka sementara). Masih merujuk KSA BPS, produksi beras nasional 2023 sebesar 31,1 juta ton atau lebih rendah dari 2022 yang sekitar 31,54 juta ton.

Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional HM Yadi Sofyan Noor mengakui, kendala produksi yang di antaranya diakibatkan oleh persoalan pupuk bersubsidi kemungkinan besar tidak terjadi lagi tahun ini. Sebab, selain menaikkan kuantum pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton di 2024 dari sebelumnya 4,73 juta ton, pemerintah juga telah memudahkan petani mengaksesnya dengan cukup mengguna-

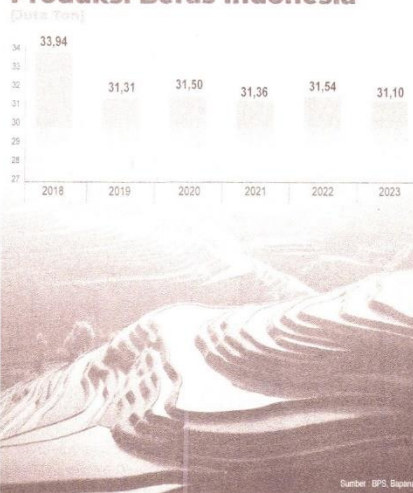
kan kartu tanda penduduk (KTP). "Pupuk kita enggak ada masalah (lagi), walaupun ada di daerah-daerah tertentu yang jauh (dari kios pengecer) ada tambahan biaya (transportasi), itu mereka (sudah) protes. Karena itu, kalau La Nina belum datang, masih mungkinlah (target produksi beras 32 juta ton tercapai)," ungkap Sofyan saat dihubungi *Investor Daily* dari Jakarta, baru-baru ini.

Ekosistem Perberasan

Pemerintah telah berupaya menciptakan ekosistem yang baik guna menggenjot produksi beras nasional tahun ini. Selain meningkatkan kuantum pupuk bersubsidi, pemerintah awal Juni ini juga menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) menjadi Rp 6.000 per kilogram (kg). Meski masih di bawah usulan, kalangan petani mengapresiasi penyesuaian HPP itu. "Usulan RTNA itu Rp 6.500 per kg, tapi akhirnya keluar angka Rp 6.000 per kg, ya sudah kami terima. Kami sudah minta teman-teman di lapangan menerima dulu angka Rp 6.000 per kg tersebut. Yang penting bukan cuma fleksibilitas, tapi betul-betul HPP, sehingga bisa memberikan kepastian hukum. Dan kami bersyukur daripada HPP sebelumnya yang hanya Rp 5.000 per kg," ujar Sofyan.

Namun mengingat sektor pertanian sangat tergantung

Produksi Beras Indonesia



iklim dan cuaca, karenanya selain mengantisipasi potensi El Nino maka pemerintah juga perlu menyiapkan mitigasi apabila terjadi La Nina. Bagi kalangan petani, fenomena La Nina juga perlu diwaspadai karena mereka memiliki keterbatasan dari sisi fasilitas pengeringan (*dryer*). "Yang kami takutkan sebentar lagi La Nina. La Nina itu biasanya banyak hujan, datang banjir. Dampaknya adalah produksi enggak maksimal karena banyak hujan daripada

panas," jelas Sofyan. Menurut dia, La Nina berdampak kurang baik bagi kualitas hasil panen, apalagi petani mengandalkan sinar matahari untuk mengeringkan gabah. "Kalau La Nina, gabahnya enggak bagus, basah, produksijadi enggak bisa maksimal, apalagi buat daerah-daerah yang terkena banjir," tandas dia.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) terus mengencangkan optimasi lahan melalui program pompanisasi guna

memperkuat produksi beras nasional yang sempat turun pada 2023 akibat cuaca ekstrem El Nino yang melanda seluruh dunia. Program itu sejalan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta perluasan sistem tata kelola air melalui pompanisasi. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan, pompanisasi adalah solusi cepat dalam mengantisipasi kekeringan panjang yang telah menurunkan produksi dalam negeri beberapa waktu lalu. "Saat ini, seluruh jajaran Kementan bergerak di lapangan memastikan pompa terpasang secara baik, terutama di daerah-daerah sentra beras di seluruh Indonesia," jelas Mentan.

Solusi Inflasi Beras

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan, sektor pertanian harus menjadi solusi pasti dalam pengendalian inflasi nasional. Karena itu, Kepala Negara meminta jajarannya mempercepat pompanisasi pada lahan-lahan sawah tadah hujan yang mengalami kekeringan panjang akibat gelombang panas ekstrem di hampir semua daerah. "Saya sudah perintahkan secepatnya memasang pompa-pompa, mungkin 20 ribu-an pompa akan kita pasang di daerah-daerah yang memiliki produksi beras. Ini yang nanti menjaga inflasi kita tidak


naik," papar Jokowi.

Saat Rakornas Pengendalian Inflasi 2024 pada 14 Juni 2024, Presiden memperkirakan, pada 2050, para petani akan kekurangan air karena kekeringan panjang dan dunia kelaparan berat karena sebagian sentra pangannya gagal panen. "Ini harus diantisipasi dari sekarang karena 50 juta petani akan kekurangan air," jelas Jokowi. Karena itu, pompanisasi adalah solusi cepat bagi sektor pertanian ke depan. Presiden bersyukur Kementan telah mendistribusikan pompa hingga 1.600 unit ke berbagai daerah produksi beras nasional. "Pompa sudah dikirim ke kodam-kodam, masuk 1.600 pompa, terutama di daerah-daerah produksi. Saya minta pompa dari sungai naikan ke atas untuk mengairi sawah, baik itu sungai besar, sedang, kecil, jangan biarkan air masuk ke laut," kata Jokowi.

Dalam keterangan yang dikutip Senin (17/06/2024), Presiden juga akan mengecek langsung pompanisasi yang telah dilakukan. Diharapkan di September sudah mulai panen raya, sehingga RI memiliki kekuatan pangan terhadap berbagai ancaman dan krisis multidimensi. "Nanti saya cek agar di lapangan agar saat kering karena El Nino, Juli sudah mulai, masuk Agustus, September, kita betul-betul siap, sehingga produksi tidak turun. Itu *goal*-nya," jelas Kepala Negara.

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**

Title	Laju Hilirisasi Sawit dari Komoditas Lain	 Kementerian Pertanian
Date	18 Juni 2024	
Media	Koran Kontan	
Page	12	
Author	Leni Wandira, Sabrina R	

PERKEBUNGAN SAWIT

Laju Hilirisasi Sawit dari Komoditas Lain

JAKARTA. Program hilirisasi sawit domestik terus berkembang, ketimbang hilirisasi di komoditas lain. Ini nampak dari data yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini.

Menurut laporan BPS, kinerja ekspor minyak sawit mentah atau *crude palm oil* (CPO) pada Februari 2024 sebanyak 2,17 ton, turun 26,48% dibandingkan Januari 2024 yang sebesar 2,81 juta ton.

Sementara volume ekspor olahan *Palm Kernel Oil* (PKO) naik dari 106.000 ton pada Januari 2024 menjadi 129.000 ton pada Februari 2024.

Sebagai salah satu komoditas strategis yang menopang perekonomian nasional, pemerintah mengaku terus mendorong industri sawit berkelanjutan dari hulu hingga hilir. Sebagai gambaran, pada 2023, nilai ekspor kelapa sawit dan turunannya mencapai US\$ 28,45 miliar, 11,6% terhadap total ekspor non-migas, serta menyerap hingga 16,2 juta orang tenaga kerja langsung dan tidak langsung.

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono mengatakan, ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah jika ingin porsi ekspor olahan kelapa sawit terus meningkat hingga mencapai level 100%.

"Paling penting pemerintah perlu membuka jalan untuk pasar ekspornya. Kalau ada pasarnya, pasti akan ada investasi baru untuk yang lebih hilir lagi," ujar Eddy ke KONTAN, pekan lalu.

Kata dia, investor pasti ter-



KONTAN/Baihaki

Hilirisasi sawit akan berhasil jika ada beberapa faktor yang mendukung. Pasalnya saat ini porsi ekspor minyak sawit mentah atau *crude palm oil* (CPO) jauh lebih rendah dibandingkan dengan produk olahan CPO.

tarik untuk masuk dan ber-ekspansi ke sektor yang lebih hilir, jika pasar hilirisasi produk sawit sudah terpetakan.

"Kalau pasarnya memung-

[KONTAN/Agro/Agro/Agro/Agro/Agro](#)

Pemerintah perlu mematok bea keluar ekspor turunan CPO lebih rendah.

kinkan untuk penambahan investasi, pasti investor akan masuk atau investor yang sudah ada akan melakukan ekspansi atau investasi baru," jelasnya.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati In-

donesia (GIMNI), Sahat Sinaga mengatakan, program hilirisasi sawit juga tergantung pertimbangan bisnis ekspor-tir. Maka, ia menyerukan pemerintah menetapkan bea keluar ekspor produk turunan CPO serendah mungkin.

"Kalau bea keluar kecil maka eksportir lebih untung menjual produk turunan ketimbang mereka melepas barangnya ke luar negeri dalam bentuk CPO," ungkap Sahat.

Jika pemerintah menerapkan kebijakan itu, maka bukan mustahil pengembangan hilirisasi CPO di dalam negeri akan terus berkembang. Dengan begitu, pemerintah juga yang diuntungkan karena nilai jual produk turunan jauh lebih tinggi dari produk mentah.


Menurut Sahat, rata-rata ni-

lai jual produk turunan berkisar 1,5 kali di atas harga CPO. Segendang sepenarian, ia menyakini kalau hilirisasi CPO berada dalam tren yang cukup positif. Di mana volume produk hilir kini sekitar 8,6 kali lebih tinggi dibandingkan volume CPO.

Wakil Direktur Utama sekaligus *Corporate Secretary* PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMART), Jimmy Pramono bilang, pihaknya terus memperluas portofolio produk guna memenuhi permintaan pelanggan yang terus berkembang.

"Pertumbuhan permintaan untuk pangan dan oleokimia terus meningkat," ujarnya baru-baru ini.

Leni Wandira, Sabrina R

Title	El Nino Ancam Panen Raya di Berbagai Daerah	
Date	18 Juni 2024	
Media	Media Indonesia	
Page	6	
Author	MR/BB/LN/JS/J-3	

El Nino Ancam Panen Raya di Berbagai Daerah

FENOMENA alam El Nino kini telah meresahkan petani di berbagai daerah karena dikhawatirkan akan menyebabkan gagal panen. Di Aceh, cuaca panas terik saat ini telah mengganggu pertumbuhan tanaman cabai.

Ridwan, petani cabai merah di Kemukiman Gatot, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie, kepada *Media Indonesia* mengatakan batang cabai kerdil dan keriting, tidak subur menghijau. Lalu batangnya juga mengecil, pendek, dan sebagian di antaranya layu.

“Bunganya pun sedikit, cukup banyak berguguran. Bahkan, sebagian batang cabai itu layu saat buah masih muda. Padahal, tidak kurang dalam hal pemupukan dan sangat sering disemprot pupuk daun,” tutur Ridwan.

Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman optimistis 11 daerah lumbung pertanian Indonesia bisa menghadapi iklim ekstrem demi menopang ketahanan pangan di Tanah Air.

Menurutnya, saat ini Kementan telah mengambil sejumlah langkah untuk membantu para petani mengatasi iklim ekstrem. Salah satunya, memberikan bantuan pompa dan tambahan jumlah pupuk pada para petani agar tanaman pertanian mereka tetap berjalan meski di tengah ancaman cuaca.

“Pemerintah menaikkan jumlah pupuk dua kali lipat dengan nilai Rp28 triliun, yang terbesar selama ini agar siap menghadapi iklim ekstrem. Ada pula bantuan pompa sebagai so-

lusi cepat dampak El Nino,” kata Amran.

Di Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, aparat daerah setempat menginstruksikan seluruh desa untuk mewaspadai potensi kekeringan akibat musim kemarau. Beberapa desa di antaranya merupakan wilayah langganan kekeringan.


Camat Mande Epi Rusmana mengaku, sudah mengantisipasi potensi prediksi terjadi kemarau panjang tahun ini. Bahkan Epi menyebut, sejak awal sudah mengumpulkan para kepala desa membahas hal ini.

“Kita komunikasi dan koordinasi dengan para kepala desa bagaimana kalau memang terjadi kemarau panjang. Alhamdulillah, disepakati antisipasinya kita upayakan memaksimalkan ketahanan pangan,” kata Epi.

Sementara itu, Polres Klaten, Jawa Tengah, menyalurkan bantuan air bersih dan sembako untuk warga terdampak kekeringan di Desa Tlogowatu, Kecamatan Kemalang, Klaten, Jumat (14/6). Penyaluran air bersih sebanyak 10 tangki dan 40 paket sembako itu, dipimpin Wakapolres Komisaris Tegar Satrio Wicaksono.

Kegiatan ini adalah bagian dari bakti sosial Polres Klaten untuk memperingati Hari Bhayangkara ke-78 tahun ini.

“Pemberian bantuan air bersih dan sembako kepada warga terdampak kekeringan ini bentuk nyata tekad Polri untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat,” ujarnya. (MR/BB/LN/JS/J-3)

Title	Idul Adha Usai, Harga Pangan masih Meroket	 Kementerian Pertanian
Date	18 Juni 2024	
Media	Media Indonesia	
Page	6	
Author	Marliansyah	

Idul Adha Usai, Harga Pangan masih Meroket

Harga cabai keriting tembus Rp100 ribu per kilogram dan bertahan hingga usai Idul Adha di Kabupaten Rejanglebong, Bengkulu. Padahal, wilayah itu merupakan sentra pertanian di Bengkulu.

MARLIANSYAH
marliansyah@mediaindonesia.com

HARI Raya Idul Adha telah usai dirayakan seluruh umat muslim di Tanah Air. Namun, hal tersebut tidak juga membuat harga berbagai komoditas melandai.

Harga cabai keriting tembus Rp100 ribu per kilogram (kg) dan bertahan hingga usai Idul Adha di Kabupaten Rejangle-

bong, Bengkulu. Padahal, wilayah itu merupakan sentra pertanian di Bengkulu.

"Harga naik sehari menjelang Idul Adha dan bertahan Rp100 ribu hingga Idul Adha pada Senin (17/6)," kata Mang Udin, pedagang Pasar Atas, Kecamatan Curup.

Kenaikan harga cabai juga terjadi di Kota Padang, Sumatera Barat. Harga komoditas itu naik karena tingginya permintaan masyarakat.

Harga cabai merah naik dari Rp76.667 menjadi Rp80 ribu/kg. Harga cabai hijau naiknya dari Rp50.333 menjadi Rp52 ribu/kg.

"Harga cabai rawit naik cukup tinggi, sebesar 16,67%, karena semakin meningkatnya permintaan masyarakat, sedangkan harga cabai hijau dan cabai merah kenaikannya tidak setinggi cabai rawit kalau dibandingkan dengan minggu lalu," jelas Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako, Putra Dewangga, kemarin.

Harga cabai rawit juga makin pedas di Pasar Kite, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Harga cabai rawit di wilayah itu tembus hingga Rp100 ribu/kg. Mita, salah satu pedagang, mengatakan harga kebutuhan

pokok khususnya cabai rawit dan cabai besar keriting masih tinggi.

"Harga cabai rawit ini naik tidak langsung, tapi bertahap sebelum Lebaran lalu. Hingga saat ini Rp100 ribu/kg untuk cabai rawit dan Rp85 ribu/kg untuk cabai besar keriting," kata Mita, kemarin.

Operasi pasar

Sebagai respons atas tingginya harga kebutuhan pokok yang terus terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar Operasi Pasar Bersubsidi (Opadi).

Kegiatan itu digelar di Kota Cirebon, Tasikmalaya, Bekasi, dan Banjar. Kemudian Kabupaten Cirebon, Kabupaten Tasikmalaya, Bekasi, Indramayu, Kuningan, Garut, Purwakarta, Karawang, Subang, dan Ciamis. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat menyediakan bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah.


"Jadi, dengan Opadi ini masyarakat bisa membeli kebutuhan pokok 5 kg beras dan 2 kg gula, serta 2 liter minyak goreng seharga Rp100 ribu, yang biasanya Rp145.700," ujar Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin.

Di sisi lain, kenaikan harga tidak hanya terjadi pada produk pangan hortikultura, tetapi juga pada pangan hewani. Di Aceh, harga ayam kampung (ayam lokal) melambung tinggi. Kenaikan harga itu diduga disebabkan permintaan ayam kampung di Aceh dalam dua hari terakhir meningkat luar biasa.

Di Pasar Ayam Pante Teungoh, Kota Sigli, Kabupaten Pidie, misalnya, harga seekor ayam kampung dewasa berbobot 2 kg dibanderol Rp150 ribu dari sebelumnya Rp100 ribu. Usman, pedagang ayam keliling di Pidie, pun terpaksa menjual dengan harga yang tinggi agar tetap mendapat untung.

"Modal kami tentu lebih besar daripada biasanya. Tidak ada cara kalau bukan menjual lebih tinggi lagi," tutur Usman.

Harga gula pasir di Purwokerto, Jawa Tengah, mengalami kenaikan rata-rata sebesar Rp1.500/kg dalam sepekan terakhir. Surti, salah seorang pedagang Pasar Purwosari, Kecamatan Baturaden, mengaku memang ada kenaikan harga gula pasir pada awal pekan ini jika dibandingkan dengan awal pekan lalu. "Mungkin karena Hari Raya Idul Adha jadi harga gula pasir naik," katanya. (YH/RF/SG/MR/TS/J-3)

Title	Kurban dan Sinergi Kebangsaan	 Kementerian Pertanian
Date	18 Juni 2024	
Media	Media Indonesia	
Page	4	
Author	Handi Risza	

Kurban dan Sinergi Kebangsaan

Handi Risza
Wakil Rektor Universitas Paramadina

HARI Raya Idul Adha, atau lebih dikenal dengan sebutan Hari Raya Kurban 2024, atau 1445 H, memiliki momentum yang sangat tepat untuk membangkitkan kembali sinergi kebangsaan antarsesama anak bangsa. Setelah melewati tahapan demokrasi yang sangat penting, pemilihan presiden dan anggota legislatif yang melelahkan, sudah saarinya kita kembali bersinergi untuk melanjutkan proses pembangunan.

Hadirnya Hari Raya Kurban memiliki makna yang mendalam, selain menunjukkan kepatuhan terhadap perintah Sang Khalik (*habluminlah*), kurban memiliki dimensi ekonomi dan sosial yang sarat dengan sinergi, kerja sama, gotong royong, dan saling berbagi (*habluminnas*).

Sejatinya kurban berasal dari bahasa Arab, yaitu *qaruba-yaqribu-urbaan*, yang berarti dekat dalam dimensi spiritual dan sosial. Dalam dimensi spiritual, kurban juga disebut dengan istilah *al-udhiyyah* dan *adh-dhahiyah* yang berarti binatang sembelihan, seperti unta, sapi (kerbau), dan kambing yang disembelih pada Hari Raya Kurban, dan hari-hari *tasyriq* sebagai bentuk *taqarrub* atau mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Sebagaimana yang dicontohkan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS dalam menjalankan perintah Allah SWT untuk berkorban pertama kalinya, peristiwa tersebut mengajarkan ujian keimanan dan keikhlasan seorang hamba untuk mengorbankan sesuatu yang sangat berharga dan dicintainya kepada Sang Khalik Pemilik Cinta yang sesungguhnya.

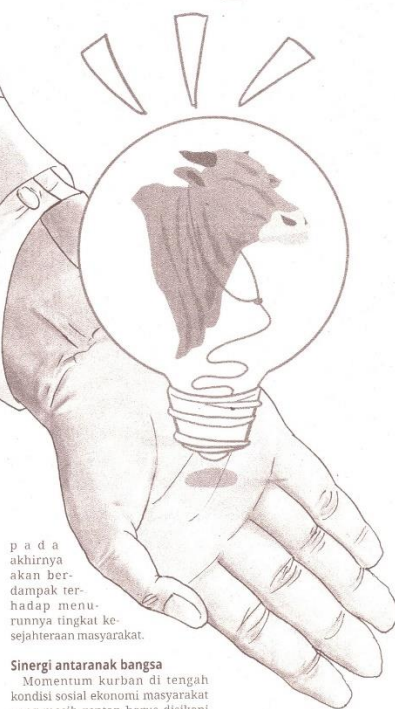
Kurban juga memiliki dimensi sosial yang mendalam dalam bentuk kepedulian terhadap sesama. Daging sapi atau kambing yang dikurbankan kepada masyarakat yang berada di sekitar lokasi penyembelihan, sebagai bentuk berbagi kebahagiaan. Berkorban juga merupakan ak-

tualisasi pengembangan kepedulian sosial, semangat berbagi, dan sikap mengasihkan sesama tetangga dan masyarakat sekitar.

Sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad SAW, setiap Hari Raya Kurban selalu menyembelih sendiri hewan kurban yang kemudian mendistribusikannya kepada kaum fakir dan miskin, hanya sedikit disisakan untuk dimakan keluarganya. Karena itu, semua masyarakat mendapatkan kegembiraan dalam setiap pelaksanaan pemotongan hewan kurban.

Pelaksanaan Hari Raya Kurban di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian, sesuai dihantam badai pandemi covid-19 dan masih terjadinya konflik geopolitik di berbagai belahan dunia, tentunya memiliki makna tersendiri. Pada saat yang sama, kita juga tengah dihadapkan pada kondisi iklim yang tidak menentu sehingga memengaruhi hasil panen tahun ini.

Dampaknya sangat terasa, harga komoditas pangan terus berfluktuasi dalam jangka waktu tertentu, terbukti angka inflasi bahan pangan cukup tinggi jika dibandingkan dengan harga komoditas lainnya. Kondisi itu tentu akan memengaruhi daya beli dan konsumsi masyarakat, yang



pada akhirnya akan berdampak terhadap menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Sinergi antaranak bangsa

Momentum kurban di tengah kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih rentan harus disikapi dengan semangat sinergi sesama anak bangsa. Semangat sinergi itu ditandai dengan keterlibatan banyak pihak dalam pelaksanaan ibadah kurban, mulai pembelian dan penyembelihan hewan kurban hingga pendistribusian daging kurban kepada masyarakat.

Rantai pasok kurban tersebut hanya bisa berjalan dengan baik jika

dilakukan secara bersama-sama dan bersinergi dengan banyak pihak. *Multiplier effect* yang ditimbulkan dari kurban tidak hanya bagi peternak hewan, tetapi juga bisa dirasakan pembuat pakan ternak, pencari rumput, pembuat beduk masjid, hingga penjual hewan kurban secara musiman. Dengan demiki-

an, kolaborasi yang ditimbulkan dari kurban itu akan memberikan dampak bagi perekonomian masyarakat. Semangat kolaborasi dalam berkorban tentunya menjadi modal penting dalam memperkuat kembali pranata sosial yang mulai menipis di tengah-tengah masyarakat. Apalagi, saat ini kita sedang dihadapkan ancaman krisis pangan dan banyak terjadi bencana alam di beberapa daerah, tentunya ini menjadi ujian tersendiri bagi bangsa menjelang pergantian kepemimpinan nasional. Masih banyak saudara kita yang masih terpapar akibat persoalan ekonomi yang semakin sulit. Hadirnya daging kurban yang bisa dikonsumsi keluarga bisa menjadi pelipur lara dari beban ekonomi yang makin berat.

Menebarkan paket hewan kurban ke seluruh pelosok negeri tanpa terkecuali hendaknya menjadi iktihar kita bersama untuk bersinergi saling membantu dan menolong antarsesama. Program itu bentuk kepedulian kita untuk saling berbagi dengan sesama. Hewan kurban yang disembelih pada hari pelaksanaan kurban (*tasyriq*) hendaknya diprioritaskan kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu. Bahkan, kalau perlu, dikemas dalam bentuk kaleng yang bisa bertahan lama baru kemudian didistribusikan ke pelosok-pelosok negeri yang selama ini jarang bisa merasakan daging kurban.

Keteladanan dan pengurbanan pemimpin

Kesadaran Nabi Ibrahim AS dan putranya, Nabi Ismail AS, juga hendaknya bisa menjadi inspirasi bagi para pemimpin di semua level kepemimpinan mulai tingkat terendah hingga level tertinggi, untuk selalu memprioritaskan kepentingan publik kerimbang pribadi dan kelompok mereka meskipun mereka harus mengurbankan diri sendiri.

Peristiwa kurban tersebut hendaknya menjadi pelajaran bagi pemimpin di seluruh negeri untuk mau mengurbankan ego pribadi,

keluarga, kelompok, hingga partai mereka demi kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar. Keteladanan seorang pemimpin dimulai ketika dia punya komitmen untuk tidak selalu dilayani. Keinginan untuk selalu dilayani itu menjebak para pejabat negara untuk menggunakan fasilitas negara yang pada akhirnya berujung korupsi.


Tidak kalah pentingnya, pemimpin harus memiliki karakter dan keimanan yang kukuh untuk mengikis setiap ego dan nafsu pribadi yang berlebihan, jujur dalam setiap langkah, transparan dalam bersikap, sehingga kebijakan yang dibuatnya akan memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat dalam menjaga dan melindungi masyarakat dari setiap ancaman yang ada.

Pada saat kondisi ekonomi yang sulit seperti saat ini, para pemimpin hendaknya memberikan keteladanan dengan mengutamakan nasib dan keselamatan bangsa dan negara. Memastikan daya beli dan konsumsi masyarakat tersedia, menyalurkan semua bantuan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Jangan sampai, di tengah penderitaan rakyat, masih ada segelintir pejabat melakukan *moral hazard*, korupsi, manipulasi bantuan sosial bagi masyarakat.

Penutup

Pelaksanaan Hari Raya Kurban 1445 Hijrah bisa menjadi momentum memperkuat kembali sinergi dan membangkitkan rasa empati secara kolektif sesama anak bangsa. Kurban memberikan inspirasi yang mendalam bagi kita semua untuk bersinergi mengatasi permasalahan bangsa secara bersama-sama.

Kurban hendaknya juga memberikan keteladanan dari para pemimpin untuk senantiasa mengorbankan kepentingan pribadi mereka dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar. Pada Hari Raya Kurban ini, semoga Allah SWT selalu memberikan keselamatan dan keberkahan bagi bangsa yang kita cintai ini.

Title	Idul Adha Tahun ini Hasilkan 608 Ton Sampah	
Date	18 Juni 2024	
Media	Media Indonesia	
Page	8	
Author	Ata/JI/S-1	

Idul Adha Tahun ini Hasilkan 608 Ton Sampah

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memperkirakan pada perayaan Idul Adha tahun ini ada sebanyak 608 ton timbunan sampah plastik. Angka itu meningkat dari tahun 2023 yakni 357 ton.

Direktur Pengurangan Sampah KLHK Vinda Damayanti mengungkapkan, berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, tahun 2024 jumlah hewan kurban 1,97 juta ekor.

“Berdasarkan hasil analisa kami, potensi timbunan sampah diperkirakan sejumlah 608 ton sampah dari 121,5 juta lembar kantong kresek,” kata Vinda saat dihubungi, kemarin.

Ia pun menegaskan bahwa kantong plastik mengandung zat karsinogen yang berbahaya bagi Kesehatan. Selain itu, sebagian besar kantong plastik mengandung logam berat timbal (Pb) yang melebihi batas yang ditentukan dan dapat masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan atau makanan.

Menurut dia, untuk menekan potensi timbunan sampah plastik, pihaknya menganjurkan untuk pembagian daging kurban dapat menggunakan wadah sendiri. “Atau wadah ramah lingkungan seperti menggunakan wadah besek berbahan anyaman bambu, besek daun kelapa atau dibungkus dengan daun,” imbuh Vinda.

Ia juga menjelaskan, KLHK telah


menerbitkan Surat Edaran Menteri Nomor: SE.6/MENLHK/PSLB3/PLB.0/6/2024 tentang Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha Tanpa Sampah Plastik kepada seluruh Gubernur, bupati/wali kota untuk melakukan upaya-upaya pengurangan sampah plastik pada Hari Raya Idul Adha.

Beberapa hal yang diimbau di antaranya agar bupati dan wali kota menyebarluaskan informasi Idul Adha tanpa sampah plastik melalui media cetak, elektronik maupun media sosial kepada masyarakat luas.

Upaya mengurangi sampah plastik, dilakukan warga yang menyembelih hewan kurban di Brebes, Jawa Tengah. Mereka menggunakan daun jati untuk membungkus daging yang hendak dibagikan ada warga.

Adalah H Ridhohul Kukham, waga Desa Luwunragi, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, yang membagikan daging hewan kurban-nya menggunakan daun jati tersebut. Tak tanggung-tanggung, Ridho bahkan menyembelih hewan kurban yakni sapi, sebanyak 15 ekor.

“Kami sudah menyarankan kepada panitia yang terlibat untuk tidak menggunakan kantong plastik dalam membungkus daging kurban. Namun menggunakan daun jati,” ujar Ridho, kemarin. (Ata/JI/S-1)

Title	China Resmi Mulai Selidiki Babi Eropa	 Kementerian Pertanian
Date	18 Juni 2024	
Media	Koran Kontan	
Page	16	
Author	Harris Hadinata	

China Resmi Mulai Selidiki Babi Eropa

Penyelidikan antidumping terhadap daging babi Eropa bisa hambat impor

Harris Hadinata

BEIJING. China secara resmi memulai penyelidikan anti dumping atas produk daging babi dan turunannya yang diimpor dari Eropa. Ini merupakan balasan Tiongkok atas rencana Uni Eropa mengenakan tarif tambahan hingga 38,1% pada kendaraan listrik yang diproduksi di China.

Kementerian Perdagangan China mengumumkan, kemarin, penyelidikan akan fokus pada daging babi yang diperuntukkan bagi konsumsi manusia. Penyelidikan dimulai pada 17 Juni tahun ini hingga 17 Juni 2025. Bila dibutuhkan, penyelidikan bisa diperpanjang enam bulan.

China menggunakan kom-

plain dari Asosiasi Peternakan Hewan China sebagai dasar untuk melakukan penyelidikan. Spanyol, Belanda dan Denmark diduga akan paling terdampak kebijakan ini.

China memang kerap menjadikan produk pangan sebagai target dalam perselisihan dagang dengan negara lain. "Menurut logika pejabat Tiongkok, petani kehilangan pasar China yang besar akan berdampak langsung pada pejabat terpilih," papar Even Pay, analis Trivium China, seperti dikutip *Reuters*, kemarin.

Tidak khawatir

China mengimpor daging babi senilai US\$ 6 miliar pada 2023, termasuk jeroan. Lebih dari setengahnya berasal dari

Eropa, menurut data bea cukai China. Spanyol merupakan pemasok daging babi terbesar bagi Tiongkok tahun lalu, diikuti oleh Brasil dan Amerika Serikat. Pemasok utama lainnya adalah Prancis, Denmark dan Belanda.

Jurubicara Komisi Eropa mengatakan tidak khawatir menyikapi rencana penyelidikan antidumping China. Uni Eropa akan mengintervensi untuk menjamin investigasi berjalan sesuai aturan World Trade Organisation.

Kendati begitu, Spanyol menyatakan akan melakukan negosiasi dengan China untuk menghindari pemberlakuan tarif. "Kami dan Uni Eropa bersama mencari solusi tanpa harus mengganggu sektor tersebut," kata Menteri Ekonomi

Spanyol Carlos Cuevo.


Menteri Pertanian Spanyol Luis Planas mengatakan, ia tidak yakin tarif akan langsung diberlakukan setelah China menerapkan investigasi. "Saya harap ada ruang untuk negosiasi, untuk menghindari pengenaan tarif bagi produk pangan dan pertanian," kata dia di Madrid, kemarin.

Spanyol mengekspor 560.488 ton produk babi ke China di 2023 lalu. Nilainya setara € 1,29 miliar, atau sekitar Rp 22,73 triliun.

Menurut data Interporc, asosiasi produsen babi Spanyol, ekspor daging babi ke China setara 20,3% dari total volume ekspor daging babi keseluruhan. Dari sisi nilai, ekspor ke China setara 13,7% dari total nilai ekspor babi. ■

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN

Title	Jokowi Minta Kepala Daerah Lakukan Antisipasi	 Kementerian Pertanian
Date	18 Juni 2024	
Media	Radar Garut	
Page	1 Part 1	
Author	Dis	

Jokowi Minta Kepala Daerah Lakukan Antisipasi

Ancaman Kekeringan dan Gelombang Panas

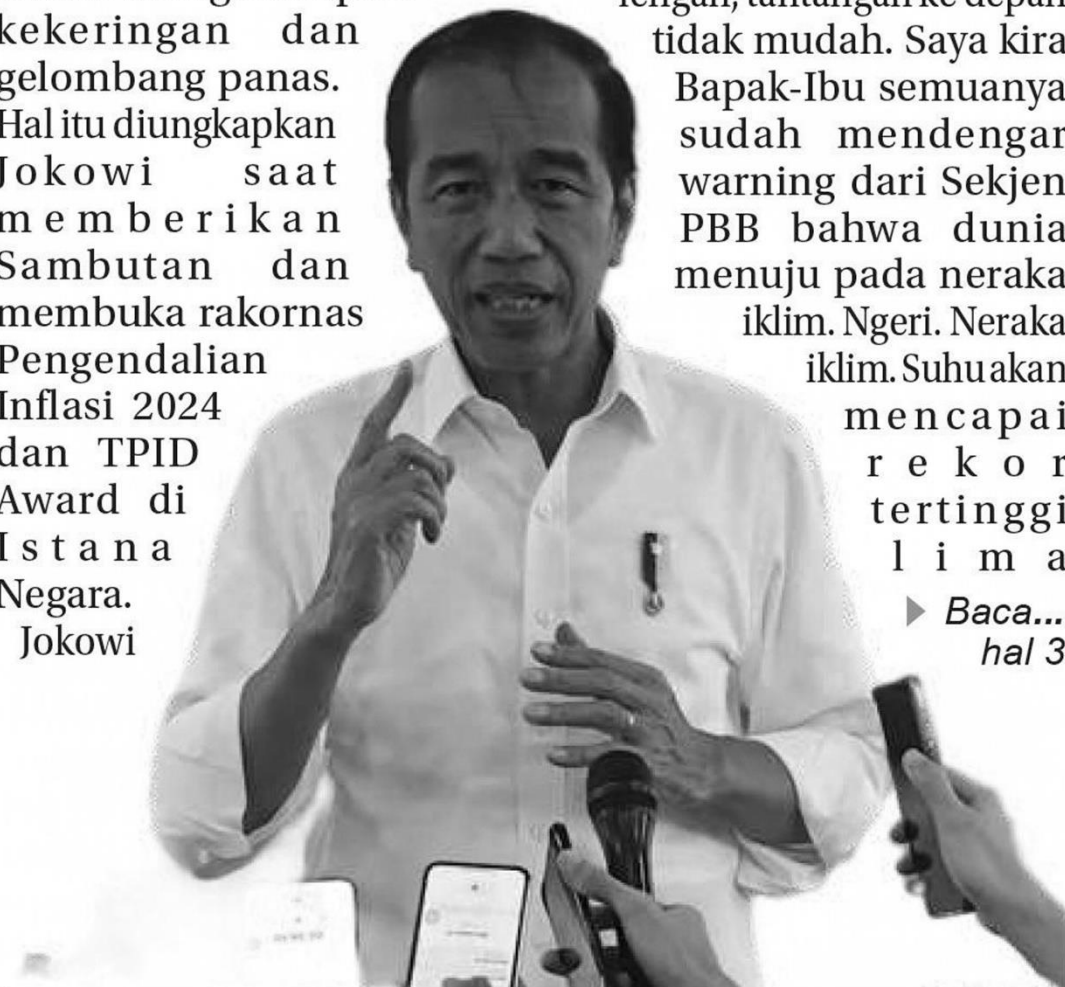
JAKARTA - Jelang pemerintahannya berakhir, Presiden Joko Widodo meminta kepala daerah untuk mengantisipasi kekeringan dan gelombang panas. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberikan Sambutan dan membuka rakornas Pengendalian Inflasi 2024 dan TPID Award di Istana Negara. Jokowi


mengingatkan untuk mewaspadaai tantangan di masa depan berkaitan dengan isu iklim dan pangan. Jokowi juga menyebutkan peringatan dari Sekretaris Jenderal PBB António Guterres bahwa dunia menghadapi 'neraka iklim'.

"Kita harus tetap harus waspada, hati-hati tidak boleh lengah, tantangan ke depan tidak mudah. Saya kira Bapak-Ibu semuanya sudah mendengar warning dari Sekjen PBB bahwa dunia menuju pada neraka iklim. Ngeri. Neraka iklim. Suhu akan

mencapai rekor tertinggi lima

► *Baca... hal 3*



Title	Jokowi Minta Kepala Daerah Lakukan Antisipasi	 Kementerian Pertanian
Date	18 Juni 2024	
Media	Radar Garut	
Page	1 Part 2	
Author	Dis	

Jokowi Minta Kepala Daerah ...

► **SAMBUNGAN**

dari hal 1

tahun ke depan, hati-hati,” katanya.

Jokowi mengatakan, dalam satu tahun terakhir, Indonesia telah mengalami gelombang panas. Bahkan, imbuhnya, suhu panas di India mencapai 50 derajat Celcius dan di Myanmar mencapai 45,8 derajat Celcius.

Jika situasi ini dibiarkan, imbuhnya, menurut FAO [Food and Agriculture Organization] pada tahun 2050 dunia akan mengalami kekeringan yang berdampak pada kekurangan pangan.

Oleh karena itu, Jokowi menekankan pentingnya mengantisipasi kekeringan dan gelombang panas yang dapat berimbas pada produksi pangan dan inflasi.

“Artinya apa? Jangan main-main urusan kekeringan. Jangan main-main urusan gelombang panas. Larinya nanti bisa ke inflasi. Begitu stok tidak ada, produksi berkurang. Produksi berkurang stok tidak ada, artinya harga pasti akan naik. Otomatis itu. Hukum pasar memang seperti itu,” ucap Jokowi.

Untuk mengantisipasi rentetan masalah tersebut, Jokowi telah menginstruksikan Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerja sama dengan TNI untuk memasang pompa-pompa air. Setidaknya, imbuhnya, sekitar 20 ribu pompa dipasang di daerah-daerah produksi pangan, utamanya daerah penghasil beras.

“Saya cek kemarin di Jawa Tengah sudah masuk pompanya 1.400, tapi akan tambah lagi, terutama daerah-daerah produksi. Akan saya cek di lapangan, sehingga betul-betul saat kering karena El Nino nanti di beberapa wilayah mungkin di bulan Juli sudah mulai, mungkin yang masuk ke Agustus, September, Oktober kita siap, sehingga produksi tidak turun. Itu golnya kenapa dipasang pompa,” imbuhnya.

Selain pemasangan pompa, pemerintah dalam 10 tahun memiliki target membangun 61 waduk dan bendungan. Hingga saat ini, sudah 43 waduk dan bendungan yang diresmikan.

Namun, sambungnya, pembangunan waduk dan bendungan diperlukan sistem

irigasi yang baik, termasuk saluran primer, sekunder, dan tersier agar air sampai ke sawah sehingga meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan.

Jokowi juga menekankan pentingnya penerapan teknologi untuk meningkatkan produksi pada sektor pertanian dan perkebunan.


“Sekarang adalah eranya teknologi, eranya smart system. Utamanya yang di kabupaten kita harus bisa meng-upgrade sistem perekonomian kita menjadi smart agriculture, terutama untuk unggulan-unggulan yang ada di daerah kita masing-masing,” ujar Jokowi.

Jokowi juga mengajak untuk mengundang investasi dalam membangun industri pengolahan agar nilai tambah dari setiap produksi pertanian dan perkebunan meningkat.

“Bangun juga sistem distribusi yang terintegrasi. Ini sudah dilakukan sekarang oleh RRT. Sehingga betul-betul sistem distribusinya betul-betul terintegrasi betul. Saya kira kalau koordinasi pusat dan daerah bisa berjalan, apa yang tadi saya sampaikan akan bisa kita lakukan,” katanya. (dis)

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**

Title	Petani Semangka Desa Samuda Sulit Tentukan Harga	 Kementerian Pertanian
Date	18 Juni 2024	
Media	Banjarmasin Post	
Page	7	
Author	Han	



BANJARMASIN POST/HANANI

PENGANGKUTAN BUAH - Aktivitas di Sungai Desa Samuda, Kecamatan Daha Selatan, diramaikan pengangkutan buah semangka hasil panen tiap tahunnya.

Petani Semangka Desa Samuda Sulit Tentukan Harga

KANDANGAN, BPOST - Sebagian petani semangka di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) kini panen semangka.

Mereka yang panen adalah petani di Desa Samuda, yang secara letak lahannya lebih tinggi ketimbang di desa-desa lainnya penghasil semangka.

Meski panennya tak berbarengan dengan petani di desa-desa lain, mereka kesulitan menentukan harga sendiri, sehingga tak bisa menlknati harga maksimal.

Padahal saat ini, harga satu kilogram semangka di pasaran Rp 13 ribu sampai Rp 14 ribu. Bahkan ada yang lebih.

"Sekarang cuma Rp 4.500 sampai Rp 4.700 per kilogram di tingkat petani," ujar Ketua Kelompok Tani Ray, Desa Samuda, Yusuf, Minggu (16/6).

Dijelaskan Yusuf, dalam menentukan harga, petani sangat tergantung kepada mereka yang meminjami modal untuk tanam buah semangka.

"Para pemilik modal meminjami modal, dengan syarat hasil panel dijual kepada mereka dan merekalah yang menentukan harga. Jadi, para petani yang meminjam modal cuma pasrah, asal untung saja. Tapi tidak bisa menikmati untuk maksimal," katanya.

Harga yang ditentukan pemodal itu, dikatakan Yusuf, juga berlaku bagi petani yang punya modal mandiri, sehingga sulit bagi petani mandiri menaikan harga.

Biasanya, para pemodal datang ke lokasi setelah panen, dengan membawa truk atau pikap, untuk dibawa, ke-


mudian dijual kembali ke wilayah Kalsel maupun luar wilayah Kalsel, seperti Samarinda Kaltim dan Kalteng.

Tiga Kecamatan Daha, yang terdiri Daha Selatan, Daha Utara dan Daha Barat yang berada di wilayah HSS merupakan daerah penghasil semangka terbesar di Kalsel. Namun, petani setempat hanya bisa tanam di saat lahan rawa-rawa yang sangat luas terbentang tersebut kering atau musim kemarau.

Saat ini, hanya sebagian lahan rawa yang kering dan sudah taman dan sekarang mulai panen. Sedangkan di Desa Muning, Muning Tengah dan Muning Baru yang berlokasi di pinggir jalan akses menuju Daha belum tanam, dan diperkirakan baru bisa tanam Juli mendatang. (han)

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**

Title	Program Pompanisasi Dipercepat Antisipasi Kekeringan Sawah	 Kementerian Pertanian
Date	18 Juni 2024	
Media	Kaltim Post	
Page	13 Part 1	
Author	Nda	

Pertanian Dituntut Jadi Solusi Pengendali Inflasi

Program Pompanisasi Dipercepat, Antisipasi Kekeringan Sawah

Program pemasangan pompa (pompanisasi) pada lahan-lahan sawah tadah hujan diminta dipercepat. Sebab saat ini banyak sawah yang mengalami kekeringan akibat gelombang panas ekstrem yang melanda hampir semua daerah. Sekaligus untuk mewujudkan pertanian sebagai solusi pasti dalam mengendalikan inflasi.


PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran kerjanya untuk segera mempercepat pemasangan, pembangunan pompa-pompa di daerah. "Mungkin ada sekitar 20.000-an pompa akan kita pasang di daerah-daerah yang memiliki produksi beras. Ini yang nanti menjaga inflasi kita tidak naik," ujarnya akhir pekan lalu.

Baca **PROGRAM**..Hal 19 ■



IST/KP

GERAK CEPAT: Presiden Jokowi meminta Kementerian Pertanian untuk mempercepat program pompanisasi untuk mengantisipasi dampak kekeringan.

Title	Program Pompanisasi Dipercepat Antisipasi Kekeringan Sawah	 Kementerian Pertanian
Date	18 Juni 2024	
Media	Kaltim Post	
Page	13 Part 2	
Author	Nda	

PROGRAM

Sambungan dari hal 13

Presiden memperkirakan pada 2050 mendatang para petani akan mengalami kekurangan air akibat kekeringan panjang. Akibatnya, dunia akan mengalami kelaparan berat karena sebagian sentranya mengalami gagal panen. "Ini yang harus direncanakan dan diantisipasi mulai dari sekarang karena diperkirakan 50 juta petani akan kekurangan air. Enggak ada air," katanya.

Menurut Presiden, pemasangan pompa adalah solusi cepat bagi sektor pertanian ke depan. Karena itu dia bersyukur Kementerian Pertanian (Kementan) telah mendistribusikan pompa hingga 1600 unit ke berbagai daerah produksi nasional.

"Beberapa pompa sudah dikirim ke kodam-kodam dan masuk pompa 1.600, terutama di daerah-daerah produksi. Saya minta pompa dari sungai naikkan ke atas untuk mengairi sawah baik itu sungai besar, sedang, kecil jangan biarkan air masuk ke laut," katanya.

Presiden menambahkan dirinya akan mengecek secara langsung pemasangan pompa yang telah dilakukan. Dia berharap September mendatang sudah mulai panen raya sehingga Indonesia memiliki kekuatan pangan terhadap berbagai ancaman dan krisis multidimensi.

"Entar saya cek di lapangan sehingga betul-betul saat kering karena El Nino, bulan Juli sudah mulai, masuk Agustus, September kita siap sehingga produksi tidak turun. Itu goahya," katanya.

Diketahui, Kementerian Pertanian (Kementan) terus

mengencarkan optimasi melalui pompanisasi untuk memperkuat produksi nasional yang sempat turun akibat cuaca ekstrem el nino yang melanda seluruh dunia. Program tersebut sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta perluasan sistem tata kelola air melalui pemasangan pompa.

"Solusi yang kita gencarkan saat ini adalah pompanisasi sebagai upaya bersama

dalam meningkatkan produksi. Dan sekarang ini, kita harus berkolaborasi dengan semua pihak agar Indonesia betul-betul memiliki ketahanan pangan," katanya.

Mentan mengatakan pompanisasi harus berjalan secara cepat mengingat target pemerintah ke depan adalah menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Sebab hanya dengan cara itu,

Indonesia mampu meningkatkan indeks pertanamannya menjadi 3 kali dari yang tadinya satu kali. "Tentu kita optimis bisa meningkatkan indeks pertanaman melalui pompanisasi dan juga mekanisasi. Apalagi presiden sudah menambah alokasi pupuk hingga 100 persen," katanya.

Presiden juga meminta seluruh sungai di Indonesia dilakukan pengecekan untuk pemasangan pompa guna

memenuhi kebutuhan air bagi lahan-lahan sawah tadah hujan yang kering akibat gelombang panas ekstrem. "Pompa air dari sungai, naikkan ke atas untuk mengairi sawah baik itu sungai besar, sedang maupun kecil. Jangan biarkan air masuk ke laut, karena itu segera pompa," ujar Presiden.

Mengenai hal ini, Presiden mengapresiasi kerja keras jajaran Kementerian Pertanian yang terus menjalin kolaborasi

dengan TNI dalam mendistribusikan pompa ke sejumlah daerah sentra. Menurut Presiden, sedikitnya lebih dari 1600 pompa sudah tersebar ke seluruh Indonesia. "Beberapa sudah dikirim ke Kodam-kodam, dan masuk pompa 1600, terutama di daerah-daerah produksi," katanya.


Meski begitu, Presiden meminta agar jajaran terkait membangun saluran-saluran yang terus menjalin kolaborasi

sekunder. Dia berharap, dengan cara itu seluruh waduk dan bendungan yang dibangun dapat mengalirkan pasokan airnya.

"Harus ada saluran primer, irigasi sekunder dan tersier sehingga air bisa sampai ke sawah dan meningkatkan produksi. Jadi yang sebelumnya hanya satu kali panen bisa menjadi tiga kali. Dengan begini inflasi bisa terjaga," katanya. (ndu)

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN

Title	Atasi Kekeringan Beri Bantuan	 Kementerian Pertanian
Date	18 Juni 2024	
Media	Sumatra Ekspres	
Page	15	
Author	Uni	

Atasi Kekeringan, Beri Bantuan

KAYUAGUNG- Memaksimalkan penggunaan pompa-pompa dan mekanisasi dalam mendukung Program Optimalisasi Lahan (Oplah) 65 ribu hektare lahan pertanian, Pemda OKI punya cara tersendiri. Pemerintah ini memberikan bantuan 129 alat mesin pertanian.

Pj Bupati OKI, Ir Asmar Wijaya MSI mengatakan, sebanyak 129 alat mesin pertanian berupa 35 unit traktor roda empat, 84 traktor roda dua dan 10 unit rotapator diserahkan kepada gabungan kelompok tani (gapoktan). "Semoga bantuan ini dapat membantu petani untuk pengolahan lahan pertanian lebih cepat," katanya.

**SERAHKAN
129 ALSINTAN
DAN 13 MESIN
POMPA**

Bupati Asmar juga menyalurkan alat pompanisasi lahan untuk mengantisipasi kekeringan berupa 13 unit mesin pompa 6 inci. Lalu, 21 unit mesin pompa 4 inci dan 166 unit mesin pompa 3 inci.

Dikatakannya, penyaluran bantuan kepada para petani ini untuk mempercepat pengolahan lahan serta menghemat biaya produksi. Ini bantuan dari pemerintah pusat. "Diharapkan dengan bantuan alsintan ini mempercepat pengolahan lahan pertanian, lebih efisien dan bisa meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten OKI," katanya.

Asmar optimis program optimalisasi lahan melalui mekanisasi dan pompanisasi ini bakal meningkatkan indeks pertanaman. Biasanya petani hanya bisa menanam



BANTUAN: Pj Bupati OKI, Ir Asmar Wijaya MSI menyerahkan bantuan 129 alat mesin pertanian berupa 35 unit traktor roda empat, 84 traktor roda dua dan 10 unit rotapator diserahkan kepada gabungan kelompok tani (gapoktan).

sasi ini bakal meningkatkan indeks pertanaman. Biasanya petani hanya bisa menanam

satu kali dalam satu tahun dengan adanya mekanisasi dan pompa air ini akan ada

percepatan. "Sehingga petani bisa menanam dua kali dalam setahun bahkan tiga

kali dengan komoditi berbeda," beberrnya.

Semoga bantuan yang diberikan pemerintah bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh petani untuk produktivitas lahan pertanian mereka.

Mudharuddin, dari kelompok tani Desa Bandar Jaya Kecamatan Air Sugihan OKI, merasa bersyukur dengan bantuan yang diberikan. "Ini akan sangat membantu dalam memaksimalkan hasil pertanian dan mempercepat proses penanaman," katanya.

Dirinya mewakili seluruh kelompok tani yang mendapatkan bantuan mengucapkan terimakasih kepada pemerintah pusat melalui kementerian pertanian dan Pemkab OKI yang telah menyalurkan bantuan. "Kita akan semaksimal mungkin memanfaatkan alat pertanian untuk meningkat-


kan produksi padi," katanya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura OKI, Sahri mengatakan, Oplah rawa dan pasang surut di OKI fokus pada tata kelola air efisien dan perbaikan infrastruktur irigasi. "Jadi pada saat musim hujan, kondisi lahan tidak lagi terendam lama agar lahan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, sementara di musim kemarau masih ada cadangan air," ucapnya.

Oplah yang dicanangkan Kementan, lanjutnya, merupakan salah satu langkah strategis mengantisipasi kekeringan lahan untuk produksi padi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan produktivitas lahan sawah melalui penyediaan sarana produksi berupa pupuk dan bantuan pengolahan tanah. (uni)

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**

Title	Pemkab Siapkan Beasiswa	 Kementerian Pertanian
Date	18 Juni 2024	
Media	Tribun Pontianak	
Page	4	
Author	Ags	

Pemkab Siapkan Beasiswa

Atasi Kekurangan Tenaga Penyuluh Pertanian

SINTANG, TRIBUN - Pemerintah Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat memberikan beasiswa sekolah pertanian kepada puluhan anak Sintang dari berbagai kecamatan untuk memenuhi kebutuhan kekurangan tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

Total ada 45 orang yang diberikan beasiswa kerjasama antara Kementan dan Polbangtan di Yogyakarta dan Magelang.

"Upaya kita (mengisi kosongan PPL) masih ada mahasiswa beasiswa di Polbangtan, sebagian sudah tamat dan kerja PPL di dinas pertanian cuma belum melamar jadi pegawai. Yang kami sekolahkan 45 orang beasiswa pemma. Kuliah di Jogja dan Magelang. Itu sekolah penyuluh," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartiyus.

Kartiyus berharap, mahasiswa beasiswa penyuluh tersebut setelah lulus kuliah kembali ke Sintang dan membantu pemerintah mendampingi para petani.

"Harapan kita mereka pulang ke Sintang dan jadi penyuluh. Itu anak kita dari Kecamatan kita beri beasiswa kuliah di sana. Ada 45 orang kerjasama dengan Kementan. Untuk uang sekolah dari Kementan, biaya hidup dari pemma. Harapan kita kalau sudah tamat mereka bekerja jadi penyuluh," ujar Kartiyus.

Kartiyus menyadari, saat ini Sintang kekurangan te-



Untuk uang sekolah dari Kementan, biaya hidup dari pemma. Harapan kita kalau sudah tamat mereka bekerja jadi penyuluh

Kartiyus
Sekda Sintang

naga PPL. Faktornya, banyak PPL yang pensiun.

"Kami menyadari penyuluh kita sudah banyak tua dan mau pensiun. Kalau ndak kita sekolahkan gimana mau dapat pengantinya. Dengan adanya mereka kalau pembukaan formasi CPNS kita buka formasi untuk PPL," jelas Kartiyus.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang, Martin Nandung menyebut pihaknya kekurangan tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk mendampingi masyarakat di desa.

Idealnya kata Martin, satu desa ada 1 PPL. Namun, saat ini ada satu PPL yang mendampingi lebih 7 desa.

"Jumlah PPL kita ada kurang lebih 95 orang baik yang PNS maupun P3K. Kemudian mereka dibantu juga oleh tenaga honor yang dari Polbangtan dan ini mereka kita persiapkan nanti untuk menjadi tenaga PPL," ungkap Martin.

Menurut Martin, jumlah PPL yang pensiun lebih banyak dibandingkan dengan jumlah PPL yang masuk, baik lewat penerimaan PNS maupun P3K. "Sehingga semakin tahun jumlahnya semakin turun," ujarnya.

Martin berharap, jumlah PPL bertambah banyak. Sehingga target 1 desa satu PPL dapat tercapai.

Target ini kata Martin cukup berat. Apalagi ada 391 desa dan 14 kelurahan di Kabupaten Sintang.

"Idealnya sebenarnya 1 desa satu penyuluh tapi juga tergantung banyaknya jumlah warga yang dibina. Karena ada satu desa yang bisa ada 20 kelompok tani. Sehingga tenaga penyuluh tidak mampu kalau hanya satu orang. Idealnya 1 desa 1 penyuluh. Tapi untuk sampai ke sana kita masih lauh. Sekarang ndak sampai 100. Mudah-mudahan ada kebijakan pengangkatan tenaga honorer jadi P3K," harap Martin. (ags)

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTAN**